

## Putri Candrawathi Serahkan 12 Bukti Tambahan Sebelum Bacakan Pleidoi

JAKARTA (IM) - Terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawathi kembali menjalani sidang lanjutannya, Rabu (25/1), dengan agenda pembacaan pleidoi. Dalam persidangan, pengacara Putri sempat menyerahkan 12 bukti tambahan.

"Saudara terdakwa Putri sehat hari ini?" tanya Ketua majelis hakim, Wahyu Iman Santoso kepada Putri Candrawathi di persidangan, Rabu (25/1).

"Mohin izin Yang Mulia, saya masih agak sedikit gangguan pencernaan, tapi saya siap," jawab Putri.

Pengacara Putri, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menyerahkan 12 bukti tambahan ke persidangan. Sebelumnya, pi-

haknya juga telah menyerahkan 35 bukti tambahan di persidangan.

"12 bukti tambahan yang kami ajukan hari ini, pertama bukti riset pemesanan PCR, kedua tangkapan layar pesan WA saksi Ariyanto dengan petugas PCR, foto aktivitas Yosua dampingi Pak Ferdy Sambo," ucapnya. "Selanjutnya bukti keterangan pers HAM tentang peristiwa kematian Yosua ada dugaan kuat kekerasan seksual, berita tentang Komnas HAM soal kekerasan seksual dialami Putri, riset pemesanan pesawat Pak Ferdy Sambo, 1 bundle pendapat ahli, serta komparasi keterangan Bharada E yang berubah berulang kali," kata Febri di persidangan. ● **mei**

## PKS Hormati Pilihan NasDem Siapkan Alternatif Koalisi Lain

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menghormati langkah Partai NasDem untuk mempersiapkan alternatif lain untuk koalisi jika Koalisi Perubahan gagal, yang dijajaki NasDem, PKS dan Demokrat.

"Kami juga hormati pilihan NasDem terkait wacana poros alternatif. Karena setiap partai independen dengan sikap politiknya," ujar Kholid pada wartawan, Rabu (25/1).

Kholid menegaskan, hingga saat ini proses komunikasi antara NasDem, OKS dan Demokrat masih berjalan. Negosiasi antara ketiga partai politik (parpol) masih berjalan dan belum menemukan jalan buntu.

"Dinamika dalam proses perundingan itu biasa saja. Tidak ada jalan buntu, insya Allah ada jalan terbuka," katanya.

"Terbuka sekali bahkan, butuh kesabaran, dan kedisiplinan," ujar Kholid melanjutkan.

Kholid optimis bahwa Koalisi Perubahan pasti bakal terwujud. "Tinggal selangkah

lagi, sudah jauh perjalanan, dan pembahasan di tim kecil Insya Allah akan ada hasil terbaik," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya bakal mempersiapkan alternatif koalisi lain di luar PKS, dan Demokrat. Sebab, ia merasa Demokrat terus mendorong untuk memisahkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, bagi NasDem, penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) mestinya dilakukan dengan membahas kriteria.

Sebelum sampai ke sana, Ali mengungkapkan, mestinya ketiga parpol mendeklarasikan diri lebih dulu menjadi Koalisi Perubahan untuk mendukung Anies sebagai capres.

"Jadi, kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi. Artinya, itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa NasDem menghindari itu," kata Ali pada wartawan, Selasa (24/1). ● **han**

## Seorang Mahasiswi Tewas Tertabrak Kendaraan Rombongan Pejabat Polisi

JAKARTA (IM) - Video yang memperlihatkan seorang mahasiswa tewas tertarak kendaraan rombongan pejabat polisi viral di media sosial. Korban diketahui bernama Selvi Amalia Nuraeni, mahasiswa jurusan Fakultas Hukum (FH) Universitas Suryakencana.

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan jajarannya segera menyelidiki hal itu. Kejadian naas itu diunggah oleh akun Twitter @mazzini\_gsp. Ia memposting dengan tulisan bahwa mahasiswi berparas cantik itu tewas usai mengalami kejadian tabrakan. Akun itu juga menuliskan bahwa, Selvi diduga ditabrak oleh rombongan pejabat teras kepolisian.

"Selvi Amalia Nuraeni, Mahasiswi FH Unsur adalah korban tabrakan di Jl Raya Bandung. Selvi diduga tertabrak oleh rombongan pejabat teras kepolisian," tulis akun tersebut sebagaimana dilihat, Rabu (25/1).

Dalam postingannya, akun itu meminta agar pelaku yang menabrak korban diusut dan diungkap hingga ditangkap.

"Sampai sekarang pelaku belum tertangkap dan kepolisian setempat terkasan menutup-nutupi. #SolidaritasUntukSelvi," sambung akun tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait dengan adanya kasus tersebut. Dia pun meminta bawahannya untuk menyelidiki peristiwa itu.

"Terima kasih informasinya, saya cek segera ya," balas Kapolri melalui akun resminya @LsityoSigitPrabowo. ● **Ius**

### PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. AIKONIKA DENIRA ARTHA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Perseroan") mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan rencana pengalihan seluruh saham dalam Perseroan yang mana akan mengakibatkan perubahan terhadap seluruh pemegang saham dan pengendalian terhadap Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor 18, yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setiap pihak yang berkeberatan terhadap rencana pengalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini ke alamat: Jalan Teuku Cik Ditiro 1 No.6, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Telepon : 021353974

DIREKSI  
PT. AIKONIKA DENIRA ARTHA

### PEMBERITAHUAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT. TUNAS MANDIRI MIGAS berkedudukan di Jakarta Pusat, akan mengadakan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan. Pihak-pihak yang berkeberatan dipersilahkan mengajukan keberatannya kepada Bapak Agung Sosiawan, HP no. 08161329947, email: [agung.sosiawan@yahoo.com](mailto:agung.sosiawan@yahoo.com) selambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini guna memenuhi pasal 127 ayat 2, UU no.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 26 Januari 2023  
DIREKSI  
PT. TUNAS MANDIRI MIGAS

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYA PRATAMA GAS

Dengan ini, Direksi PT Surya Pratama Gas, berkedudukan di Sukabumi ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023  
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Jalan Yonif 310, KM 2 Cikembar, Cikate, Sukabumi  
Agenda : 1. Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan  
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sukabumi, 26 Januari 2023  
Direksi Perseroan  
PT Surya Pratama Gas

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## RAKOR ANTISIPASI KARHUTLA 2023

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kanan) serta perwakilan sejumlah instansi memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB Jakarta, Rabu (25/1). Rakor tersebut untuk memastikan kesiapan BNPB dalam mengantisipasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2023, diantaranya enam provinsi rawan karhutla yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.

# Jokowi Disebut Ajak Ketum Parpol Bahas "Reshuffle", Airlangga: Itu Prioritas Presiden

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut informasi soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat cukup kuat.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah bertemu beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Kepresidenan, baru-baru ini. Menurut informasi, salah satu yang dibahas saat bertemu ketum parpol adalah soal reshuffle atau perombakan kabinet.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal re-

shuffle, hal itu merupakan prioritas Presiden Jokowi.

"Kalau ini kan untuk prioritas Presiden ya," ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Rabu (25/1).

Airlangga tak mau menjawab ketika ditanya wartawan apakah hanya ia yang diajak bertemu Presiden Jokowi untuk membahas soal perombakan anggota kabinet. Ia hanya

mengulangi pernyataannya bahwa agenda tersebut adalah prioritas Presiden Jokowi.

"Itu prioritas," katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku mendengar akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Informasi reshuffle itu cukup kuat.

"Iya, bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat, dan siapa aja itu kami enggak tahu," ujar Awiek -panggilan untuk Achmad Baidowi di kompleks parlemen MPR/

DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Bahkan Awiek mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah mengajak diskusi masing-masing ketua umum parpol.

"Beberapa kali, dalam beberapa hari, ketum-ketum partai bertemu presiden. Ya bisa jadi dibahas juga di situ. Kami dengar informasi ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle," kata Awiek.

Namun, Awiek belum bisa memastikan kapan reshuffle itu dilakukan. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. "Tetapi kapannya hanya presiden yang tahu," ujar Awiek.

Sementara itu, Presiden Jokowi saat ditanya wartawan lagi soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, tidak menjawabnya secara lugas. Man-

tan Wali Kota Solo itu hanya meminta publik menunggu.

"Tunggu," jawab Jokowi singkat.

Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga mengaku tidak diajak Presiden Jokowi berbicara soal reshuffle atau perombakan kabinet. Sebab itu, Puan mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja menteri yang perlu dievaluasi.

"Wah, saya enggak bisa katakan hal itu. Itu kan prerogatif Presiden, dan saya enggak diajak bicara sama Presiden. Jadi, ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Puan mengatakan, pada prinsipnya reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. ● **han**

## Ribuan Perangkat Desa Menuntut Kejelasan Status Kepegawaiannya

JAKARTA (IM) - Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1). Mereka menuntut kejelasan status. Ribuan orang yang kebanyakan berseragam khaki tersebut sudah berada di depan Gedung DPR sejak pagi dan mulai berorasi.

Massa tampak memenuhi akses jalan dari arah pertigaan Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto (depan Senayan Park) hingga ke arah Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Pejompongan.

Ratusan bus besar yang mengangkut perangkat desa tersebut diparkir di dalam dan sekitar area Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan di Jalan Gerbang Pemuda.

Salah satu perangkat desa dari Bantar Kaung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Imam (56), mengungkapkan dirinya sudah berangkat dari Brebes sejak magrib kemarin.

"Kita tiba di Jakarta sejak jam 5 pagi dan kemudian bergerak menuju ke gedung DPR dan melakukan aksi sejak jam 8 pagi," kata Imam, Rabu (25/1).

Massa aksi yang berasal dari Persatuan Perangkat Desa

Indonesia (PPDI) berunjuk rasa untuk menuntut kejelasan status perangkat daerah.

"Kita ini seperti dibuat tidak jelas statusnya, ASN bukan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bukan. Makanya kita melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut kejelasan," ucap Imam.

Sementara itu, perangkat desa Warung Asem, Kabupaten Batang, Udin (45) menyebutkan, dirinya bersama ratusan perangkat desa lainnya sudah berangkat sejak pukul 19.00 WIB.

"Ada 18 bus berangkat. Kalau untuk biaya bus dan makan-makan semua ada panitia nya, dan biayanya kita patungan," kata Udin.

Ia mengaku banyak para perangkat desa yang sudah mengabdikan belasan bahkan puluhan tahun saat ini tidak jelas statusnya. "Apalagi batas usia perangkat desa itu maksimal 60 tahun, setelahnya putus tugas. Tidak dapat apa-apa seperti tunjangan uang pensiun dan hak-hak seperti yang didapatkan para pegawai negeri sipil," ujar Udin.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Moh Tahril, mengatakan, 70 per-

wakilan PPDI akan menyampaikan tuntutan ke Komisi II DPR RI.

"Ya jadi kami diminta perwakilan 70 orang untuk bisa memberikan detail usulan kami kepada pembambil kebijakan," kata Tahril saat ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Rabu (25/1).

Selain menuntut kejelasan status, para perangkat desa itu juga mengungkapkan kegelisahan mereka atas maraknya pemberhentian yang non-prosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa.

"Makanya kami mohon agar kami terlindungi," ucapnya.

Tahril memaksa agar dua tuntutan para perangkat desa dapat dikabulkan. Jika tidak kata Tahril, maka pihaknya bakal menurunkan 10 kali lipat demonstran. "Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan terus berusaha, lewat jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat lagi," ucapnya.

"Hari ini yang datang (demo depan Gedung DPR sebanyak) 45.000 orang," katanya.

Artinya, kata Tahril, jika tuntutan tidak dipenuhi, maka akan ada sebanyak 450.000 ribu massa yang bakal memadati Gedung DPR RI. ● **han**



FOTO: ANT

## PENANGKAPAN BURONAN KPK IZIL AZHAR

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggiring buronan Izil Azhar alias Ayah Merin (kanan) saat tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Aceh, Rabu (25/1). Izil Azhar merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga DPO KPK sejak akhir November 2018 itu di tangkap tim gabungan Polda Aceh dan KPK di kawasan Banda Aceh terkait kasus dugaan gratifikasi pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 senilai Rp32,4 miliar.